



LAPORAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

**Dinas Komunikasi dan Informatika
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung B Pulau Senoa Lt II Natuna, Kepulauan Riau 29777
Laman diskominfo.natunakab.go.id Pos-el : diskominfo@natunakab.go.id

RANAI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tahapannya meliputi identifikasi, penilaian, mitigasi, serta pemantauan risiko. Jenis risiko bisa berupa strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Tujuan utama manajemen risiko adalah meminimalkan dampak negatif dan memastikan kelangsungan operasional. Penerapan manajemen risiko berlandaskan konsep SPIP yang telah diterapkan serta terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses manajemen risiko umumnya terdiri dari tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Diharapkan, manajemen risiko dapat meningkatkan kesadaran organisasi terhadap risiko serta mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, organisasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan optimal.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian risiko. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerapkan manajemen risiko guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural, sejalan dengan implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategis khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke 6 (enam) yaitu **Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel.**

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Natuna;
5. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Struktur Pengelola Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Tindak lanjut Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko dilakukan untuk mengendalikan dan menangani berbagai risiko yang kemungkinan akan timbul dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
2. Menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
3. Menentukan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak risiko.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu organisasi atau instansi. Laporan ini menjadi alat evaluasi dalam menilai sejauh mana manajemen risiko telah diterapkan secara efektif serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam prosesnya.

Laporan ini berperan penting dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik serta memastikan keberlanjutan operasional dengan mitigasi risiko yang

lebih optimal. Kegiatan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi / rekomendasi kepada unit kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan

Tujuan dilakukan pengelolaan risiko, yaitu :

1. Mengidentifikasi bahaya dan perkiraan risiko
2. Mengetahui seberapa pentingnya mereka
3. Berpikir tentang bagaimana orang melihat risikonya
4. Mempertimbangkan etika dan keseimbangan antara risiko dan manfaat
5. Mempertimbangkan berbagai cara untuk membuat Keputusan
6. Mempertimbangkan faktor sosial yang mungkin memengaruhi masalah lingkungan dan pengambilan keputusan.

D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko ini mencakup penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, perancangan sistem informasi dan komunikasi, serta perancangan pemantauan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

BAB II

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks / Tujuan

1). Penetapan konteks strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Misi ke 6 (enam) yaitu **Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel** melalui implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategis khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 1 (satu) konteks / tujuan strategis yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada lampiran 1 (satu) form 4 (empat).

2). Penetapan konteks Risiko Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna mengacu pada Identifikasi konteks Organisasi.

Identifikasi konteks organisasi adalah proses awal yang dilakukan untuk memahami seluruh faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika, identifikasi konteks organisasi bertujuan untuk:

1. Memahami Lingkungan Operasional

Mengetahui bagaimana kondisi internal (seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, proses kerja) dan faktor eksternal (seperti peraturan, kebijakan nasional/daerah, harapan masyarakat) berpengaruh terhadap peran Inspektorat Daerah.

2. Menetapkan Fokus Pengawasan

Memahami konteks, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menentukan area prioritas pengawasan, seperti akuntabilitas keuangan, integritas pelayanan publik, dan pencegahan korupsi.

3. Mengelola Risiko Secara Efektif

Konteks organisasi membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang mungkin menghambat pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga dapat disusun strategi pengendalian yang lebih tepat sasaran.

4. Menyesuaikan Strategi dan Sumber Daya

Dengan pemahaman konteks, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyesuaikan strategi kerja dan mengalokasikan sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) secara lebih efektif untuk mendukung kinerja.

5. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas

Identifikasi konteks menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance.

Sebagaimana tersaji data pada lampiran 2 (dua) form 5 (lima).

B. Hasil Identifikasi Risiko

1. Hasil identifikasi Risiko Prioritas dari risiko strategis dan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika pemilik risiko, penyebab risiko, dampak risiko apakah dapat dikendalikan (Controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko dan terdapat risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kurang efektif dan akuntabel akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Sebagaimana disajikan dalam lampiran 2 (dua) form 5 (lima).
2. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian dan RTP atas CEE merupakan upaya sistematis untuk mengevaluasi kecukupan pengendalian internal dan merancang tindak lanjut perbaikan terhadap kelemahan yang teridentifikasi sebagaimana tersaji pada lampiran 3 (tiga) form 6 (enam)

C. Hasil Analisa Risiko dan Pengendalian yang sudah dilakukan

Dari seluruh Risiko telah memiliki existing control sebanyak **5 (lima) Risiko Strategis** dan **141 (seratus empat puluh satu) Risiko Operasional** yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko dari Pemilik Risiko), telah dianalisis dengan **hasil jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 23 (dua puluh tiga) risiko**, yang merupakan risiko prioritas unit kerja dan menjadi Risiko Startegis Pemda dapat dilihat pada lampiran 4 (empat) form 7 (tujuh).

D. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Walaupun sebagian besar pengendalian telah dilaksanakan, masih terdapat kebutuhan untuk penguatan pengendalian lebih lanjut guna menjamin keberlanjutan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, melalui pemantauan yang lebih mendalam dan penyesuaian yang tepat terhadap dinamika yang berkembang sebagaimana pada lampiran 6 (enam) form 9 (sembilan).

BAB III

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengendalian yang telah direncanakan dan dilaksanakan menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pemantauan dan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi, guna memastikan pencapaian tujuan secara berkelanjutan dan optimal.

Walaupun sebagian besar pengendalian telah dilaksanakan, masih terdapat kebutuhan untuk penguatan pengendalian lebih lanjut guna menjamin keberlanjutan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, melalui pemantauan yang lebih mendalam dan penyesuaian yang tepat terhadap dinamika yang berkembang, sebagaimana tersaji dalam lampiran 5 (lima) form 8 (delapan).

BAB IV

RANCANGAN PEMANTAUAN

Rencana dan realisasi pengendalian yang telah dilaksanakan menunjukkan pencapaian yang signifikan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, namun masih terdapat kebutuhan untuk penguatan pengendalian intern guna memastikan keberlanjutan efektivitas pengendalian, dengan fokus pada peningkatan pemantauan dan penyesuaian terhadap perubahan yang terus berkembang.

Rancangan pemantauan yang dibutuhkan mencakup penguatan mekanisme evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian, dengan menekankan pada identifikasi potensi risiko, analisis kinerja, serta penyesuaian strategi pengendalian yang adaptif terhadap dinamika internal dan eksternal organisasi, sebagaimana terlampir pada lampiran 6 (enam) form 9 (sembilan)

BAB V PENUTUP

Dengan berakhirnya tahun kerja 2024, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan tugas Unit Pengelola Risiko (UPR) Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun ini.

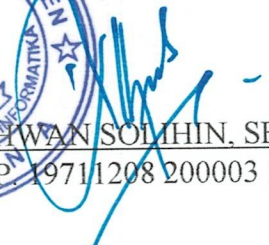
Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus refleksi atas kinerja yang telah dilakukan. Kami menyadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan respons yang lebih cepat, tepat, dan terukur kedepannya.

Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan untuk langkah yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, saran dan masukan sangat kami harapkan demi perbaikan berkelanjutan.

Ranai, 30 Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA




IKHWAN SOLIHIN, SE,MA
NIP. 19711208 200003 1 005

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

Pemerintah Kabupaten
Natuna
2024
Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko			
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	B	c	d	e	f=dxe	
I	Risiko Strategis					
1						
2						
3						
4						
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	SPBE belum Terkelola dengan Baik	RSO.25.2.16.21.03.16.001	5	4	20	
2	Pelayanan Publik Belum terkelola dengan baik	RSO.25.2.16.21.03.16.002	5	3	15	
3	Berpotensi mengakibatkan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media yang tidak efektif dan kurangnya keterlibatan publik.		4	4	16	
4	Data Statistik Sektoral tidak update	RSO.25.2.20.21.03.16.004	5	3	15	
5	Hilangnya data, kebocoran data dan kesulitan dalam menjaga keamanan Informasi	RSO.25.2.21.21.03.16.005	5	3	15	

III	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	beban kerja kegiatan publikasi tidak seimbang dengan jumlah SDM yang sedikit	ROO.25.2.16.21.03.16.001	4	3		12
2	beban kerja kegiatan tidak seimbang dengan jumlah SDM yang sedikit	ROO.25.2.16.21.03.16.002	5	3		15
3	beban kerja kegiatan tidak seimbang dengan jumlah SDM yang sedikit	ROO.25.2.16.21.03.16.003	4	3		12
4	beban kerja kegiatan tidak seimbang dengan jumlah SDM yang sedikit	ROO.25.2.16.21.03.16.004	4	3		12
5	hilangnya kontrol atas narasi yang disampaikan	ROO.25.2.16.21.03.16.004	5	3		15
6	beban kerja kegiatan tidak seimbang dengan jumlah SDM yang sedikit	ROO.25.2.16.21.03.16.005	4	3		12
7	informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap	ROO.25.2.16.21.03.16.005	5	3		15
8	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain yang salah/tidak benar/tidak akurat	ROO.25.2.16.21.03.16.006	4	3		12
9	Keamanan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	ROO.25.2.16.21.03.16.006	5	3		15
10	Serangan Cyber	ROO.25.2.16.21.03.16.006	5	3		15
11	Dokumen Perencanaan Data dan Informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE yang salah/tidak benar/tidak akurat	ROO.25.2.16.21.03.16.007	4	3		12
12	Keterbatasan infrastruktur	ROO.25.2.16.21.03.16.007	4	3		12
13	Keamanan Data dan Informasi	ROO.25.2.16.21.03.16.007	4	4		16
14	Ketidaksesuaian perangkat keras dan perangkat lunak	ROO.25.2.16.21.03.16.007	4	3		12
15	Gangguan Jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.007	4	4		16
16	Sistem keamanan yang lemah	ROO.25.2.16.21.03.16.007	5	2		10
17	Bencana Alam	ROO.25.2.16.21.03.16.007	4	3		12
18	Dokumen Perencanaan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE yang salah/tidak benar/Kurang Akurat	ROO.25.2.16.21.03.16.008	4	3		12
19	Keterbatasan anggaran	ROO.25.2.16.21.03.16.008	4	3		12
20	Kurangnya SDM yang kompeten	ROO.25.2.16.21.03.16.008	4	4		16
21	Kurangnya Koordinasi	ROO.25.2.16.21.03.16.008	4	3		12

22	Dokumen Perencanaan Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang salah/tidak benar	ROO.25.2.16.21.03.16.009	4		3	12
23	Kurangnya masukan dari Masyarakat	ROO.25.2.16.21.03.16.009	4		3	12
24	Sumber Daya Manusia yang kurang memadai	ROO.25.2.16.21.03.16.009	4		4	16
25	Kurangnya Perencanaan yang Komprehensif	ROO.25.2.16.21.03.16.010	4		3	12
26	Kekurangan tenaga ahli IT yang kompeten dapat memperlambat proses implementasi jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.010	4		4	16
27	Gangguan Teknis Perangkat Keras, perangkat lunak dan jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.010	4		4	16
28	Kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam penyusunan peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	ROO.25.2.20.21.03.16.011	4		3	12
29	Kualitas Data yang Rendah	ROO.25.2.20.21.03.16.011	4		4	16
30	Pemanfaatan Data yang Terbatas	ROO.25.2.20.21.03.16.011	4		3	12
31	Penurunan Kualitas Data	ROO.25.2.20.21.03.16.011	4		4	16
32	peningkatan kualitas data tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik	ROO.25.2.20.21.03.16.012	4		3	12
33	Keterbatasan Sumber Daya	ROO.25.2.20.21.03.16.012	4		4	16
34	Keterbatasan SDM	ROO.25.2.20.21.03.16.012	4		3	12
35	Infrastruktur Teknologi	ROO.25.2.20.21.03.16.012	4		3	12
36	Koordinasi Antar Instansi	ROO.25.2.20.21.03.16.012	4		3	12
37	Kesalahan Data	ROO.25.2.20.21.03.16.012	4		3	12
38	Ketidaksesuaian Data Statistik dengan Standar	ROO.25.2.20.21.03.16.012	4		4	16
39	kesalahan dalam identifikasi kebutuhan data	ROO.25.2.20.21.03.16.013	4		4	16
40	Keterbatasan Sumber Daya	ROO.25.2.20.21.03.16.013	4		3	12
41	Sumber Daya Manusia yang terbatas	ROO.25.2.20.21.03.16.013	4		3	12
42	Kualitas data yang buruk	ROO.25.2.20.21.03.16.013	5		2	10
43	Ketidaksesuaian Data	ROO.25.2.20.21.03.16.013	5		3	15
44	Kesalahan Pengumpulan Data	ROO.25.2.20.21.03.16.013	4		3	12
45	Ketidakkakuratan Data	ROO.25.2.20.21.03.16.013	5		2	10
46	Ancaman Keamanan Informasi	ROO.25.2.21.21.03.16.014	4		3	12

47	Komunikasi Sandi	ROO.25.2.21.21.03.16.014	5	3	15
48	Kurangnya Kesadaran Keamanan	ROO.25.2.21.21.03.16.014	4	3	12
49	ancaman terhadap keamanan sistem informasi, data sensitif, dan komunikasi rahasia	ROO.25.2.21.21.03.16.014	4	3	12
50	ancaman siber,	ROO.25.2.21.21.03.16.014	4	3	12
51	Pelanggaran Keamanan	ROO.25.2.21.21.03.16.014	4	4	16
52	ketidaktahuan terhadap peraturan	ROO.25.2.21.21.03.16.014	4	3	12
53	Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi belum terdata	ROO.25.2.21.21.03.16.015	4	3	12
54	Serangan terhadap sistem informasi, seperti virus, malware, atau serangan DDoS	ROO.25.2.21.21.03.16.015	4	4	16
55	Kesalahan dalam Pengoperasian Sistem	ROO.25.2.21.21.03.16.015	4	4	16
56	Kurangnya Keterlibatan Stakeholder	ROO.25.2.16.21.03.16.016	5	2	10
57	Keterlambatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	ROO.25.2.16.21.03.16.016	5	3	15
58	Penyimpangan dari Rencana yang Disusun	ROO.25.2.16.21.03.16.016	4	3	12
59	Ketidakakuratan Perencanaan Anggaran	ROO.25.2.16.21.03.16.017	5	3	15
60	Keterlambatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	ROO.25.2.16.21.03.16.017	5	2	10
61	Kesalahan dalam Pembayaran atau Penghitungan Tunjangan	ROO.25.2.16.21.03.16.017	5	2	10
62	Ketidaksesuaian Materi Pelatihan dengan Kebutuhan Aktual	ROO.25.2.16.21.03.16.018	5	2	10
63	Penjadwalan Pelatihan yang Tidak Efektif	ROO.25.2.16.21.03.16.018	5	2	10
64	Keterlambatan atau Pembatalan Pelatihan	ROO.25.2.16.21.03.16.018	5	3	15
65	Kualitas Evaluasi Pelatihan yang Lemah	ROO.25.2.16.21.03.16.018	5	2	10
66	Penyimpangan Standar Sertifikasi	ROO.25.2.16.21.03.16.018	5	2	10
67	Ketidaksesuaian Spesifikasi Barang/Jasa	ROO.25.2.16.21.03.16.019	4	3	12
68	Kurangnya Koordinasi Antar Bagian	ROO.25.2.16.21.03.16.019	4	3	12
69	Tidak Memadai Sumber Daya Pengelolaan Pengadaan	ROO.25.2.16.21.03.16.019	5	2	10
70	Keterlambatan Pengiriman Barang/Jasa	ROO.25.2.16.21.03.16.018	5	2	10
71	Barang/Jasa Tidak Sesuai Kualitas	ROO.25.2.16.21.03.16.019	4	3	12
72	Pengadaan yang Tidak Sesuai dengan Regulasi	ROO.25.2.16.21.03.16.019	5	2	10
73	Keterlambatan pengiriman atau pemasangan	ROO.25.2.16.21.03.16.020	4	3	12
74	Ketidaksesuaian spesifikasi:	ROO.25.2.16.21.03.16.020	5	2	10

75	Kualitas produk yang kurang memadai	ROO.25.2.16.21.03.16.020	4	3	12
76	Peralatan Rusak Lebih Cepat	ROO.25.2.16.21.03.16.020	4	3	12
77	Kurangnya Ketersediaan Peralatan	ROO.25.2.16.21.03.16.020	5	2	10
78	Keterlambatan Pengiriman	ROO.25.2.16.21.03.16.020	4	3	12
79	Kebutuhan barang cetakan dan pengadaan tidak terpenuhi	ROO.25.2.16.21.03.16.021	4	2	8
80	Harga barang cetakan dan pengadaan lebih tinggi dari yang dianggarkan	ROO.25.2.16.21.03.16.021	4	2	8
81	Kualitas yang Tidak Memenuhi Syarat	ROO.25.2.16.21.03.16.021	4	3	12
82	Keterlambatan pengiriman bahan cetak	ROO.25.2.16.21.03.16.021	5	2	10
83	Kerusakan mesin cetak	ROO.25.2.16.21.03.16.021	4	2	8
84	Kesalahan dalam proses pencetakan	ROO.25.2.16.21.03.16.021	4	3	12
85	Penyimpangan dari Agenda yang Telah Disepakati	ROO.25.2.16.21.03.16.022	4	3	12
86	Ketidaksesuaian Spesifikasi Barang/Jasa	ROO.25.2.16.21.03.16.023	5	2	10
87	Kurangnya Koordinasi Antar Bagian	ROO.25.2.16.21.03.16.023	4	2	8
88	Tidak Memadai Sumber Daya Pengelolaan Pengadaan	ROO.25.2.16.21.03.16.023	4	3	12
89	Keterlambatan Pengiriman Barang/Jasa	ROO.25.2.16.21.03.16.023	4	2	8
90	Barang/Jasa Tidak Sesuai Kualitas	ROO.25.2.16.21.03.16.023	4	2	8
91	Pengadaan yang Tidak Sesuai dengan Regulasi	ROO.25.2.16.21.03.16.023	4	2	8
92	Perencanaan yang kurang matang:	ROO.25.2.16.21.03.16.024	4	2	8
93	Keterlambatan perencanaan	ROO.25.2.16.21.03.16.024	4	2	8
94	Tidak Memadai Sumber Daya Pengelolaan Pengadaan	ROO.25.2.16.21.03.16.024	5	2	10
95	Penentuan anggaran yang tidak tepat	ROO.25.2.16.21.03.16.024	5	2	10
96	Barang/Jasa Tidak Sesuai Kualitas	ROO.25.2.16.21.03.16.024	4	2	8
97	Pengadaan yang Tidak Sesuai dengan Regulasi	ROO.25.2.16.21.03.16.024	5	2	10
98	Kebutuhan yang Tidak Teridentifikasi:	ROO.25.2.16.21.03.16.025	5	2	10
99	Tinjauan Pasar yang Kurang	ROO.25.2.16.21.03.16.025	4	2	8
100	Kurangnya Pemahaman Teknis	ROO.25.2.16.21.03.16.025	4	2	8
101	kenaikan harga atau pengeluaran tak terduga	ROO.25.2.16.21.03.16.025	4	2	8
102	keterlambatan atau kualitas yang tidak sesuai spesifikasi	ROO.25.2.16.21.03.16.025	4	2	8
103	Kualitas Produk Tidak Sesuai Spesifikasi	ROO.25.2.16.21.03.16.025	4	2	8

104	Perencanaan yang tidak lengkap	ROO.25.2.16.21.03.16.026	5	2	10
105	Pilihan Pemasok yang Lemah	ROO.25.2.16.21.03.16.026	5	2	10
106	Proses pengadaan yang tidak efisien	ROO.25.2.16.21.03.16.026	4	2	8
107	Kesalahan dalam proses pengadaan	ROO.25.2.16.21.03.16.026	4	2	8
108	Kesalahan dalam Pencatatan Aset dan Persediaan	ROO.25.2.16.21.03.16.026	4	2	8
109	Biaya Tambahan yang harus dikeluarkan	ROO.25.2.16.21.03.16.026	4	2	8
110	kurang optimalnya penyediaan jasa surat menyurat	ROO.25.2.16.21.03.16.027	4	2	8
111	ketidaksesuaian dengan kebutuhan surat menyurat	ROO.25.2.16.21.03.16.027	4	2	8
112	Keterlambatan atau Kesalahan dalam Pengiriman	ROO.25.2.16.21.03.16.027	4	2	8
113	proses surat menyurat yang tidak efisien	ROO.25.2.16.21.03.16.027	4	2	8
114	Gangguan teknis	ROO.25.2.16.21.03.16.027	4	2	8
115	Ketidaktepatan dalam penyampaian informasi	ROO.25.2.16.21.03.16.027	4	2	8
116	Kerusakan Infrastruktur	ROO.25.2.16.21.03.16.028	4	2	8
117	Peralatan yang Tidak Terawat	ROO.25.2.16.21.03.16.028	4	2	8
118	Keterbatasan Sumber Daya	ROO.25.2.16.21.03.16.028	4	2	8
119	Kerusakan Infrastruktur	ROO.25.2.16.21.03.16.028	4	2	8
120	Gangguan Layanan	ROO.25.2.16.21.03.16.028	4	2	8
121	Kelebihan Anggaran	ROO.25.2.16.21.03.16.028	4	2	8
122	Kualitas Layanan	ROO.25.2.16.21.03.16.029	4	2	8
123	Keterbatasan Sumber Daya	ROO.25.2.16.21.03.16.029	5	2	10
124	Layanan PUK yang memerlukan teknologi tertentu	ROO.25.2.16.21.03.16.029	5	2	10
125	Fluktuasi Harga	ROO.25.2.16.21.03.16.029	4	2	8
126	Gangguan Teknis	ROO.25.2.16.21.03.16.029	5	2	10
127	Pengadaan yang Tidak Sesuai dengan Regulasi	ROO.25.2.16.21.03.16.029	5	2	10
129	Kurangnya Rencana Pemeliharaan Jangka Panjang	ROO.25.2.16.21.03.16.030	4	2	8
130	Tidak Memadai Spesifikasi Jasa Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.030	4	2	8
131	Ketidaksesuaian Prioritas Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.030	5	2	10
133	Keterlambatan Pelaksanaan Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.030	5	2	10
134	Kualitas Pekerjaan Pemeliharaan yang Buruk	ROO.25.2.16.21.03.16.030	5	2	10
135	Gangguan Operasional Akibat Proses Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.030	4	3	12

136	Kurangnya Rencana Pemeliharaan Jangka Panjang	ROO.25.2.16.21.03.16.031	4	3	12
137	Tidak Memadai Spesifikasi Jasa Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.031	4	3	12
138	Ketidaksesuaian Prioritas Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.031	4	2	8
139	Keterlambatan Pelaksanaan Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.031	4	3	12
140	Kualitas Pekerjaan Pemeliharaan yang Buruk	ROO.25.2.16.21.03.16.031	4	3	12
141	Gangguan Operasional Akibat Proses Pemeliharaan	ROO.25.2.16.21.03.16.031	4	3	12

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Natuna
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Usuran Pemerintahan : Usuran Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	B	c	d	E	F	g
I	Risiko Strategis					
1						
2						
3						
4						
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	SPBE belum Terkelola dengan Baik	RSO.25.2.16.21.03.16.001	20	OPD	kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	berkurangnya efisiensi, kualitas layanan publik yang rendah, dan potensi risiko keamanan data
2	Pelayanan Publik Belum terkelola dengan baik	RSO.25.2.16.21.03.16.002	15	OPD	kurangnya sumber daya, dan kurangnya inovasi	ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
3	Berpotensi mengakibatkan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media yang tidak efektif dan kurangnya keterlibatan publik.	RSO.25.2.20.21.03.16.003	16	OPD	kurangnya literasi media, penyebaran hoaks, serta kurangnya kreativitas dalam menyampaikan informasi	dampaknya disinformasi, persepsi yang keliru, dan bahkan potensi konflik.
4	Data Statistik Sektoral tidak update	RSO.25.2.20.21.03.16.004	15	OPD	Tidak Semua OPD dapat menyediakan data	Pengguna data tidak dapat memperoleh data statistik Sektoral

5	Hilangnya data, kebocoran data dan kesulitan dalam menjaga keamanan Informasi	RSO.25.2.21.21.03.16.005	15	OPD	Tingkat kesadaran yang rendah dari kepemimpinan dan pegawai terkait keamanan informasi (SMIKI)	mengakibatkan gangguan operasional, kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, dan risiko keamanan data pribadi
III	Risiko Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika					
1	beban kerja kegiatan tidak seimbang dengan jumlah SDM yang sedikit	ROO.25.2.16.21.03.16.002	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kabid PIKP	Minimnya Jumlah SDM	pengelolaan pelayanan dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat belum berjalan secara optimal
2	hilangnya kontrol atas narasi yang disampaikan	ROO.25.2.16.21.03.16.004	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kabid PIKP	ketergantungan pada media	informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kegiatan pemerintah
3	informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap	ROO.25.2.16.21.03.16.005	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kabid PIKP	Kurangnya verifikasi informasi	misinformasi pada masyarakat
4	Keamanan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	ROO.25.2.16.21.03.16.006	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Domain dan subdomain dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax	merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah
5	Serangan Cyber	ROO.25.2.16.21.03.16.006	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Domain dan subdomain dapat menjadi target serangan siber seperti serangan DDoS, phishing, atau penyusupan website	hilangnya data, gangguan layanan, dan kerugian finansial
6	Keamanan Data dan Informasi	ROO.25.2.16.21.03.16.007	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Data yang tersimpan di Pusdatkenda sangat sensitive	berpotensi menjadi target serangan siber atau akses yang tidak sah

7	Gangguan Jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.007	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	pemadaman listrik atau kerusakan infrastruktur	mengganggu komunikasi dan pengoperasian pusat kendali.
8	Kurangnya SDM yang kompeten	ROO.25.2.16.21.03.16.008	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Penerapan SPBE membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, manajemen proyek, dan aspek hukum	tidak dapat melaksanakan koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE
9	Sumber Daya Manusia yang kurang memadai	ROO.25.2.16.21.03.16.009	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/kabid e gov	Kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai dalam SPBE	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tidak dapat dilaksanakan
10	Kekurangan tenaga ahli IT yang kompeten dapat memperlambat proses implementasi jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.010	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kabid EGov	Tenaga ahli IT yang tidak kompeten menyebabkan jaringan terganggu	memperlambat proses implementasi jaringan karena mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk desain, konfigurasi, dan pemeliharaan
11	Gangguan Teknis Perangkat Keras, perangkat lunak dan jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.010	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	kerusakan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, atau masalah konektivitas jaringan	sistem berhenti bekerja atau mengalami kinerja yang buruk, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
12	Kualitas Data yang Rendah	ROO.25.2.20.21.03.16.011	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kabid EGov	belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan karena belum adanya pembinaan yang memadai	data yang tidak valid atau tidak lengkap dapat mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan, alokasi sumber daya, dan implementasi kebijakan
13	Penurunan Kualitas Data	ROO.25.2.20.21.03.16.011	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika//Kabid EGov	data yang tidak konsisten dan sulit untuk dibandingkan	Data yang tidak konsisten membuat sulit untuk memahami tren dan pola yang sebenarnya, sehingga kebijakan yang dibuat mungkin tidak efektif atau bahkan merugikan

14	Keterbatasan Sumber Daya	ROO.25.2.20.21.03.16.012	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	kurangnya tenaga ahli statistik atau teknologi informasi yang memadai dalam perencanaan	proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data menjadi lambat dan tidak efisien
15	Ketidaksesuaian Data Statistik dengan Standar	ROO.25.2.20.21.03.16.012	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Data statistik sektoral yang tidak sesuai dengan standar internasional dapat menyebabkan kesulitan dalam perbandingan data	kesulitan dalam perbandingan data dengan negara lain.
16	kesalahan dalam identifikasi kebutuhan data	ROO.25.2.20.21.03.16.013	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Identifikasi Kebutuhan Data yang Tidak Akurat	proses bisnis statistik sektoral akan menghasilkan data yang tidak relevan atau tidak lengkap
17	Ketidakakuratan Data	ROO.25.2.20.21.03.16.013	10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Data yang tidak akurat dapat memberikan informasi yang salah	mempengaruhi keputusan yang dibuat berdasarkan data tersebut
18	Komunikasi Sandi	ROO.25.2.21.21.03.16.014	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Sandi yang digunakan untuk komunikasi rahasia dapat dipecahkan oleh pihak yang tidak berwenang	mengancam kerahasiaan informasi yang disampaikan
19	Pelanggaran Keamanan	ROO.25.2.21.21.03.16.014	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Akses yang tidak sah, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi	kerugian finansial, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan publik.
20	Serangan terhadap sistem informasi, seperti virus, malware, atau serangan DDoS	ROO.25.2.21.21.03.16.015	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Sistem informasi yang tidak berfungsi dengan baik	dapat mengganggu pelayanan publik.

21	Kesalahan dalam Pengoperasian Sistem	ROO.25.2.21.21.03.16.015	16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabid E-Gov	Sistem informasi yang tidak berfungsi dengan baik	Gangguan dalam layanan publik, proses bisnis, dan komunikasi internal dan eksternal.
22	Keterlambatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	ROO.25.2.16.21.03.16.016	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Sekretaris	Proses administrasi dan pelaporan yang tidak tepat waktu atau tidak terorganisir.	Menunda pengambilan keputusan dan evaluasi, serta merugikan kredibilitas organisasi di mata pihak luar (misalnya, pemerintah pusat atau BPK).
23	Ketidakakuratan Perencanaan Anggaran	ROO.25.2.16.21.03.16.017	15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Sekretaris	Perhitungan anggaran yang tidak tepat untuk gaji, tunjangan, dan jasa pelayanan umum.	Kekurangan atau kelebihan dana, yang mengarah pada pemborosan atau kekurangan pembayaran kepada ASN dan pengadaan jasa.

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Kabupaten Natuna
2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	Melaksanakan penguatan integritas dan etika melalui pembinaan, sosialisasi nilai ASN, penerapan kode etik, pengawasan berkala, serta fasilitasi pelaporan pelanggaran untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang berintegritas.	Kepala Dinas	Triwulan I	Triwulan II
2.	Komitmen terhadap kompetensi	Perkuat kompetensi pegawai melalui penyusunan peta kebutuhan, fasilitasi pelatihan dan sertifikasi, serta evaluasi berkala guna mendukung efektivitas pengawasan.	Kepala Dinas	Triwulan II	Triwulan II
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Membangun kepemimpinan yang kondusif melalui keteladanan pimpinan, komunikasi terbuka, penguatan budaya kerja positif, serta penciptaan lingkungan kerja yang transparan dan suportif.	Kepala Dinas	Triwulan II	Triwulan II
4.	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-			
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-			
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Mendorong kebijakan pembinaan SDM yang sehat melalui perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kompetensi, penerapan sistem merit, serta evaluasi kinerja yang transparan dan berkeadilan.	Kepala Dinas	Triwulan II	Triwulan II
7.	Perwujudan peran APIP yang efektif	Mewujudkan peran APIP yang efektif melalui peningkatan kapabilitas pengawas, penguatan fungsi assurance dan consulting, serta pelaksanaan pengawasan berbasis risiko secara objektif dan independen.	Kepala Dinas	Triwulan I	Triwulan II

8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-				
----	---	---	--	--	--	--

Form 7

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Natuna
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	D	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1							
2							
II Risiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika							
1	SPBE belum Terkelola dengan Baik	RSO.25.2.16.21.03.16.001	Menyusun kebijakan internal yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatur berbagai aspek SPBE	Melaksanakan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap kematangan indeks SPBE, serta kolaborasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman.	Melakukan evaluasi menyeluruh, peningkatan SDM TIK, serta implementasi manajemen layanan SPBE yang lebih terstruktur dan terukur.	OPD	1 Tahun
2	Pelayanan Publik Belum terkelola dengan baik	RSO.25.2.16.21.03.16.002	Penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur tentang standar pelayanan publik kepada masyarakat dan aparat pemerintah	Penyusunan standar pelayanan publik yang jelas, komprehensif, dan mudah diukur	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang penyusunan standar pelayanan public	OPD	1 Tahun
3	Berpotensi mengakibatkan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media yang tidak efektif dan kurangnya keterlibatan publik.	RSO.25.2.20.21.03.16.003	Menggunakan media sosial dan media massa dengan bijak, serta memahami batasan dan tantangan yang ada, dapat membantu meningkatkan efektivitas pengendalian informasi	Media dapat memanfaatkan teknologi untuk memfilter informasi, mengidentifikasi sumber yang tidak dapat diandalkan, dan memantau penyebaran informasi.	Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintahan, media, dan masyarakat dan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi	OPD	1 Tahun

						mengenai pentingnya pengendalian informasi.		
4	Data Statistik Sektoral tidak update	RSO.25.2.20.21.03.16.004	Penggunaan sistem informasi yang terpadu untuk memudahkan berbagi data dan akses data antar instansi.	pemanfaatan teknologi informasi yang memadai dalam pengumpulan dan pengolahan data, seperti penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan penggunaan perangkat lunak yang mendukung pengolahan data.	Menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data antar instansi	OPD	1 Tahun	
5	Hilangnya data, kebocoran data dan kesulitan dalam menjaga keamanan Informasi	RSO.25.2.21.21.03.16.005	menggunakan sistem keamanan jaringan yang canggih, enkripsi data sensitif, pembatasan akses, pembaruan sistem, penggunaan otentikasi multifaktor, dan audit keamanan secara berkala sangat penting	Implementasi sistem keamanan yang kuat seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi data	Menggunakan firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi sistem dan jaringan	OPD	1 Tahun	
III Risiko Operasional								
Dinas Komunikasi dan Informatika								
1	beban kerja kegiatan tidak seimbang dengan jumlah SDM yang sedikit	ROO.25.2.16.21.03.16.002	melakukan analisis beban kerja, mengalihkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan sumber daya manusia.	melakukan analisis beban kerja, mengatasi ketidakseimbangan, dan dapat mencapai keseimbangan antara jumlah pekerjaan dan jumlah SDM, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan	Melakukan evaluasi beban pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan penyesuaian anggaran	OPD	1 Tahun	
2	hilangnya kontrol atas narasi yang disampaikan	ROO.25.2.16.21.03.16.004	menjaga keakuratan, keobjektifan, dan keadilan dalam penyampaian informasi	keakuratan berita, mencegah penyebaran informasi yang salah, dan menjaga integritas pesan yang disampaikan	Memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan telah diverifikasi oleh sumber yang terpercaya.	OPD	1 Tahun	
3	informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap	ROO.25.2.16.21.03.16.005	Memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan mampu menyajikan informasi yang terintegrasi dan akurat	Verifikasi data yang masuk, baik secara manual maupun otomatis, untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya	Analisis Penyebab dan Identifikasi sumber dan jenis informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap	OPD	1 Tahun	
4	Keamanan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	ROO.25.2.16.21.03.16.006	Pengaturan nama domain dan subdomain, Pemilihan hosting dan server yang sesuai dan Penerapan sistem deteksi intrusi dan malware	upaya menjaga keamanan dan integritas domain dan subdomain yang digunakan oleh pemerintah daerah	Memperkuat sistem keamanan domain dan subdomain yang digunakan pemerintah daerah seperti	OPD	1 Tahun	

					penggunaan password yang terus berubah, software yang ter-update, dan penggunaan firewall yang efektif.		
5	Serangan Cyber	ROO.25.2.16.21.03.16.006	mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman yang ditujukan untuk merusak atau mencuri data digital, sistem komputer, atau jaringan	Penggunaan DNS yang aman, pembaruan perangkat lunak, dan kesadaran terhadap ancaman phishing, menggunakan aplikasi keamanan seperti antivirus dan firewall dan melakukan edukasi diri tentang berbagai jenis serangan siber	Menggunakan sertifikat SSL/TLS yang valid untuk mengamankan komunikasi di domain dan sub domain.	OPD	3 Tahun
6	Keamanan Data dan Informasi	ROO.25.2.16.21.03.16.007	upaya untuk melindungi data dan informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengubahan, atau penghancuran yang tidak sah.	Menjaga data dan informasi sensitif dari pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan	Mengamankan infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak dari ancaman fisik serta membuat kebijakan, prosedur, dan standar yang jelas untuk penggunaan dan pengelolaan data dan informasi.	OPD	3 Tahun
7	Gangguan Jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.007	Memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya secara berkala untuk menutup celah keamanan yang mungkin ada.	Memperbarui sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi secara rutin untuk menutup celah keamanan	Menggunakan firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya, menerapkan enkripsi data, membuat sistem cadangan (backup) dan pemulihan data dan melakukan pembaruan sistem secara berkala.	OPD	1 Tahun
8	Kurangnya SDM yang kompeten	ROO.25.2.16.21.03.16.008	Identifikasi kebutuhan SDM yang kompeten di setiap tingkatan dalam SPBE, termasuk kebutuhan terkait pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang spesifik.	Menyusun perencanaan SDM yang terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan SPBE dan standar kompetensi yang diperlukan	Pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan SPBE dapat membantu SDM untuk memahami dan mengimplementasikan SPBE secara efektif.	OPD	1 Tahun
9	Sumber Daya Manusia yang kurang memadai	ROO.25.2.16.21.03.16.009	Meningkatkan efektivitas tata kelola SDM, seperti sistem evaluasi kinerja dan pengembangan karir,	Menentukan kebutuhan sumber daya yang spesifik untuk mendukung	Memperbaiki keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan	OPD	1 Tahun

			agar SDM dapat memberikan kontribusi optimal dalam implementasi SPBE	penyusunan rencana dan anggaran SPBE	rencana dan anggaran SPBE, termasuk pemahaman tentang SPBE, perencanaan anggaran, dan pengelolaan risiko		
10	Kekurangan tenaga ahli IT yang kompeten dapat memperlambat proses implementasi jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.010	peningkatan pendidikan, kolaborasi industri-akademik, pelatihan, dan pengembangan keterampilan	Melatih dan mengembangkan karyawan internal agar memiliki keterampilan IT dan Membangun kemitraan dengan ahli IT eksternal untuk mendapatkan bantuan dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan jaringan.	Peningkatan keterampilan staf yang ada, perekrutan tenaga ahli baru, outsourcing tugas-tugas tertentu, dan penggunaan teknologi yang dapat mempermudah tugas-tugas jaringan.	OPD	1 Tahun
11	Gangguan Teknis Perangkat Keras, perangkat lunak dan jaringan	ROO.25.2.16.21.03.16.010	pemeriksaan rutin terhadap perangkat keras untuk memastikan kondisi fisik dan fungsionalnya dan pembaruan sistem operasi dan aplikasi secara teratur untuk mengatasi bug, meningkatkan kinerja, dan melindungi dari ancaman keamanan	perangkat lunak dan firmware selalu diperbarui untuk menambal celah keamanan dan Menggunakan firewall untuk memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan mencegah akses yang tidak sah	Pemeliharaan rutin perangkat keras, seperti membersihkan debu, memeriksa suhu, dan mengganti komponen yang sudah usang, perbarui perangkat lunak secara rutin, gunakan antivirus, dan hindari perangkat lunak yang tidak aman, pemeliharaan rutin pada jaringan, periksa koneksi, dan gunakan perangkat jaringan yang berkualitas	OPD	3 Tahun
12	Kualitas Data yang Rendah	ROO.25.2.20.21.03.16.011	identifikasi, pembersihan, transformasi, dan validasi data untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan	Memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat, lengkap, dan tepat waktu dan Menggunakan alat-alat, seperti alat validasi, alat pembersihan data, atau alat transformasi data, untuk meningkatkan kualitas data	Pengiriman formulir pembaruan data atau penyaringan data ganda dan penerapan validasi data saat input, seperti pengecekan format atau rentang nilai yang valid serta Integrasi sistem database yang berbeda untuk memastikan data yang konsisten	OPD	1 Tahun
13	Penurunan Kualitas Data	ROO.25.2.20.21.03.16.011	penerapan metode dan proses untuk memastikan data tetap akurat, lengkap, konsisten, dan andal	memastikan keakuratan, konsistensi, dan keandalan data.	identifikasi sumber masalah, penerapan prosedur kualitas data, pelatihan,	OPD	1 Tahun

					identifikasi risiko dengan tepat, penilaian risiko, dan pengembangan tindakan pengendalian yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia			pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.	OPD	1 Tahun
14	Keterbatasan Sumber Daya	ROO.25.2.20.21.03.16.012		perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, evaluasi yang teratur, dan pemanfaatan yang efektif, data statistik sektoral dapat menjadi sumber informasi yang penting untuk mendukung Pembangunan				Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga ahli statistik, Rekrutmen tenaga ahli statistik yang kompeten, Penggunaan tenaga ahli statistik yang berasal dari lembaga lain (misalnya BPS), Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data statistik dan Penggunaan teknologi informasi yang tepat guna.	OPD	1 Tahun
15	Ketidaksesuaian Data Statistik dengan Standar	ROO.25.2.20.21.03.16.012		Mengumpulkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan metode pengumpulan data yang tepat, seperti survei, pengamatan, atau pengambilan sampel		Menggunakan metode pengumpulan data yang tepat, Memastikan sampel yang representatif dan Membuat pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu		Tentukan data statistik mana yang tidak sesuai standar, tinjau standar yang berlaku dan bandingkan dengan data yang ada dan Implementasikan mekanisme kontrol, seperti validasi data atau audit, untuk mencegah masalah serupa di masa depan.	OPD	1 Tahun
16	kesalahan dalam identifikasi kebutuhan data	ROO.25.2.20.21.03.16.013		validasi kebutuhan data, dokumentasi yang jelas, review reguler, dan penggunaan perangkat lunak atau alat bantu yang sesuai		Menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat dan Identifikasi potensi kesalahan dalam proses identifikasi kebutuhan data, seperti kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan interpretasi, atau ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku.		Melakukan pembersihan, validasi, dan verifikasi data secara rutin, Memastikan keakuratan, validitas, dan konsistensi hasil analisis dan Menyampaikan hasil analisis secara jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan	OPD	1 Tahun
17	Ketidakakuratan Data	ROO.25.2.20.21.03.16.013		Pengumpulan Data yang Akurat, Pemrosesan Data, Penyebarluasan (Diseminasi) data, Penerapan		Penggunaan Teknologi yang Canggih dan Penyusunan standar prosedur yang jelas		melakukan evaluasi dan identifikasi sumber-sumber ketidakakuratan data.	OPD	1 Tahun

			Standar Kualitas data dan Pemantauan dan Evaluasi data	dan konsisten untuk setiap tahap proses bisnis statistik dapat membantu memastikan bahwa data yang dihasilkan berkualitas dan akurat	Kemudian, tindakan perbaikan perlu dirancang dan dilaksanakan, seperti peningkatan kualitas data, peningkatan validasi data, dan penerapan sistem pengendalian internal yang lebih kuat		
18	Komunikasi Sandi	ROO.25.2.21.21.03.16.014	perencanaan dan implementasi sistem sandi, pelatihan sumber daya manusia, pengamanan jaringan komunikasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan insiden keamanan	meningkatkan sistem keamanan, menggunakan sandi yang kuat, menerapkan autentikasi pengguna yang lebih ketat, serta melakukan pemantauan dan audit secara berkala	Penggunaan dan Keamanan Komunikasi Sandi, Penyimpanan dan Pengamanan Informasi Sandi, Melakukan pemantauan secara berkala dan Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai tentang prosedur pengendalian komunikasi sandi, pengendalian komunikasi sandi	OPD	1 Tahun
19	Pelanggaran Keamanan	ROO.25.2.21.21.03.16.014	klasifikasi data, kontrol akses, enkripsi, dan prosedur penanganan insiden keamanan	pelatihan, kebijakan keamanan yang kuat, dan penerapan teknologi keamanan	Melakukan audit keamanan informasi secara berkala, Peningkatan kesadaran keamanan informasi, Penggunaan teknologi sandi yang aman dan Perbaikan infrastruktur keamanan fisik	OPD	1 Tahun
20	Serangan terhadap sistem informasi, seperti virus, malware, atau serangan DDoS	ROO.25.2.21.21.03.16.015	penerapan teknologi keamanan, kebijakan keamanan, hingga peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pegawai.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif tentang keamanan informasi, Melakukan identifikasi dan evaluasi risiko yang komprehensif dan Membuat rencana dan prosedur yang jelas tentang bagaimana mengelola keamanan informasi	Membuat kebijakan yang jelas dan terukur, Menetapkan prosedur baku, Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pengendalian dan Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin	OPD	1 Tahun
21	Kesalahan dalam Pengoperasian Sistem	ROO.25.2.21.21.03.16.015	Membatasi akses ke sistem dan data hanya kepada pihak yang berwenang, menggunakan otorisasi berlapis, dan pemantauan akses dan Memastikan data yang dimasukkan ke dalam	Menerapkan pengendalian akses yang ketat, seperti autentikasi berlapis dan akses berbasis peran, dapat	Menerapkan sistem backup dan pemulihan yang efektif, Melakukan pemeliharaan sistem secara rutin,	OPD	1 Tahun

			sistem valid dan sesuai dengan format yang diharapkan	membantu mencegah akses yang tidak sah dan Melakukan backup data secara berkala sangat penting untuk memulihkan sistem jika terjadi serangan atau kerusakan	Menerapkan sistem autentikasi yang kuat dan Mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab	
22	Keterlambatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	ROO.25.2.16.21.03.16.016	Menetapkan jadwal penyusunan laporan yang jelas, termasuk tenggat waktu untuk setiap tahapan, Menggunakan sistem akuntansi dan perangkat lunak yang mendukung penyusunan laporan dan Memantau kemajuan penyusunan laporan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah dan Membuat panduan dan prosedur yang jelas untuk penyusunan laporan	Membuat standar pelaporan yang jelas dan terukur, Memanfaatkan teknologi informasi yang canggih untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara lebih efisien dan Memberikan pelatihan dan pengembangan diri bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan	identifikasi penyebab keterlambatan, penentuan target penyusunan, dan implementasi langkah-langkah korektif seperti pelatihan, penggunaan teknologi, dan perubahan prosedur	OPD 1 Tahun
23	Ketidakakuratan Perencanaan Anggaran	ROO.25.2.16.21.03.16.017	penyusunan anggaran yang cermat, pemantauan kinerja anggaran, analisis variansi, dan tindakan korektif	anggaran yang kuat, termasuk pembandingan kinerja aktual dengan anggaran, perhitungan selisih, identifikasi penyebab variansi, dan tindakan korektif.	Identifikasi Penyebab Ketidakakuratan, Implementasikan sistem pengumpulan data yang lebih baik dan Pantau secara berkala realisasi anggaran dan bandingkan dengan anggaran yang direncanakan	OPD 1 Tahun

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Penda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Usulan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Natuna
2024
Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Usuran Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	C	D	e	f	g	H
1.	Melakukan evaluasi menyeluruh, peningkatan SDM TIK, serta implementasi manajemen layanan SPBE yang lebih terstruktur dan terukur.	Surat Edaran, Konfirmasi, Sosialisasi	Organisasi Perangkat Daerah	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024	
2.	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang penyusunan standar pelayanan publik	Konfirmasi, Pelatihan dan Surat Edaran	Inspektorat, BPKP dan BPK	Diskominfo	2024	2024	
3.	Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintahan, media, dan masyarakat dan menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengendalian informasi.	Media Cetak, Media Online, Sosialisasi dan Surat Edaran	Media Massa, Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo dan Masyarakat	2024	2024	
4.	Menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data antar instansi	media digital seperti internet dan jejaring sosial	Penyedia Pekerjaan, Diskominfo	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024	
5.	Menggunakan firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi sistem dan jaringan	sistem keamanan komputer dan siber	Penyedia Pekerjaan dan Diskominfo	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024	
6.	Melakukan evaluasi beban pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan penyesuaian anggaran	Surat Edaran, Konfirmasi, Sosialisasi	Diskominfo	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024	

7.	Memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan telah diverifikasi oleh sumber yang terpercaya.	Media Massa dan Media Digital	Diskominfo, Media Elektronik	Diskominfo dan Masyarakat	2024	2024	
8.	Analisis Penyebab dan Identifikasi sumber dan jenis informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap	Media Massa, Media Sosial dan Media Digital	Media elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo dan Masyarakat	2024	2024	
9.	Memperkuat sistem keamanan domain dan subdomain yang digunakan pemerintah daerah seperti penggunaan password yang terus berubah, software yang ter-update, dan penggunaan firewall yang efektif.	media digital seperti internet dan jejaring sosial	Diskominfo dan Penyedia/pendaftar domain dan sub domain	Diskominfo dan OPD	2024	2024	
10.	Menggunakan sertifikat SSL/TLS yang valid untuk mengamankan komunikasi di domain dan sub domain.	media digital seperti internet dan jejaring sosial	Diskominfo dan Penyedia/pendaftar domain dan sub domain	Diskominfo dan OPD	2024	2025	
11.	Mengamankan infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak dari ancaman fisik serta membuat kebijakan, prosedur, dan standar yang jelas untuk penggunaan dan pengelolaan data dan informasi.	Media Digital	Diskominfo dan Penyedia Perangkat	Diskominfo	2024	2025	
12.	Menggunakan firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya, menerapkan enkripsi data, membuat sistem cadangan (backup) dan pemulihan data dan melakukan pembaruan sistem secara berkala.	Media Digital	Diskominfo dan Penyedia Sistem	Diskominfo dan OPD	2024	2025	
13.	Pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan SPBE dapat membantu SDM untuk memahami dan mengimplementasikan SPBE secara efektif.	Pelatihan, Sosialisasi dan Surat Edaran, Pertemuan Koordinasi	Diskominfo, Menpanrb dan Depdagri	Diskominfo dan OPD	2024	2025	
14.	Memperbaiki keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE, termasuk pemahaman tentang SPBE, perencanaan anggaran, dan pengelolaan risiko	Pelatihan, Sosialisasi dan Surat Edaran, Pertemuan Koordinasi	Diskominfo, Menpanrb dan Depdagri	Diskominfo dan OPD	2024	2025	
15.	Peningkatan keterampilan staf yang ada, perekrutan tenaga ahli baru, outsourcing	Pelatihan dan Sosialisasi	Diskominfo dan APTIKA	Diskominfo	2024	2025	

	tugas tugas tertentu, dan penggunaan teknologi yang dapat mempermudah tugas-tugas jaringan.								
16.	Pemeliharaan rutin perangkat keras, seperti membersihkan debu, memeriksa suhu, dan mengganti komponen yang sudah usang, perbarui perangkat lunak secara rutin, gunakan antivirus, dan hindari perangkat lunak yang tidak aman, pemeliharaan rutin pada jaringan, periksa koneksi, dan gunakan perangkat jaringan yang berkualitas	Laporan Berkala, pertemuan dan dokumentasi	Diskominfo dan Penyedia Perangkat	Diskominfo	2024	2025			
17.	Pengiriman formulir pembaruan data atau penyarangan data ganda dan penerapan validasi data saat input, seperti pengecekan format atau rentang nilai yang valid serta Integrasi sistem database yang berbeda untuk memastikan data yang konsisten	Laporan Berkala, pertemuan dan dokumentasi	Diskominfo dan BPS	Perangkat Daerah dan Diskominfo	2024	2024			
18.	identifikasi sumber masalah, penerapan prosedur kualitas data, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.	Laporan Berkala, pertemuan dan dokumentasi	Diskominfo dan BPS	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024			
19.	Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga ahli statistik, Rekrutmen tenaga ahli statistik yang kompeten, Penggunaan tenaga ahli statistik yang berasal dari lembaga lain (misalnya BPS), Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data statistik dan Penggunaan teknologi informasi yang tepat guna.	Pelatihan, Sosialisasi dan Pertemuan Koordinasi	Diskominfo dan BKPSDM	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024			
20.	Tentukan data statistik mana yang tidak sesuai standar, tinjau standar yang berlaku dan bandingkan dengan data yang ada dan Implementasikan mekanisme kontrol, seperti validasi data atau audit, untuk mencegah masalah serupa di masa depan.	Pelatihan, Sosialisasi dan Pertemuan Koordinasi	Diskominfo dan BPS Natuna	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024			

21.	Melakukan pembersihan, validasi, dan verifikasi data secara rutin, Memastikan keakuratan, validitas, dan konsistensi hasil analisis dan Menyampaikan hasil analisis secara jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan	Pelatihan, Sosialisasi dan Pertemuan Koordinasi	Diskominfo dan BPS	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024
22.	melakukan evaluasi dan identifikasi sumber-sumber ketidakakuratan data. Kemudian, tindakan perbaikan perlu dirancang dan dilaksanakan, seperti peningkatan kualitas data, peningkatan validasi data, dan penerapan sistem pengendalian internal yang lebih kuat	Pelatihan, Sosialisasi dan Pertemuan Koordinasi	Diskominfo dan BPS	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024
23.	Penggunaan dan Keamanan Komunikasi Sandi, Penyimpanan dan Pengamanan Informasi Sandi, Melakukan pemantauan secara berkala dan Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai tentang prosedur pengendalian komunikasi sandi pengendalian komunikasi sandi	Sosialisasi dan Surat Edaran dan Media Elektronik	Diskominfo	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2027
24.	Melakukan audit keamanan informasi secara berkala, Peningkatan kesadaran keamanan informasi, Penggunaan teknologi sandi yang aman dan Perbaikan infrastruktur keamanan fisik	Sosialisasi dan Surat Edaran dan Media Elektronik	Diskominfo, BSSN dan Inspektroat	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2025
25.	Membuat kebijakan yang jelas dan terukur, Menetapkan prosedur baku, Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pengendalian dan Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin	Sosialisasi, Surat Edaran dan Laporan	Diskominfo, BSSN dan Inspektroat	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024
26.	Menerapkan sistem backup dan pemulihan yang efektif, Melakukan pemeliharaan sistem secara rutin, Menerapkan sistem autentikasi yang kuat dan Mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab	Sosialisasi dan Surat Edaran dan Laporan	Diskominfo, Telkomsel dan Iconet	Diskominfo dan Perangkat Daerah	2024	2024

27.	identifikasi penyebab keterlambatan, penentuan target penyusunan, dan implementasi langkah-langkah korektif seperti pelatihan, penggunaan teknologi, dan perubahan prosedur	Sosialisasi, Surat Edaran dan Laporan	Diskominfo, BPKPAD	Diskominfo	2024	2024
28.	Identifikasi Penyebab Ketidakakuratan, Implementasikan sistem pengumpulan data yang lebih baik dan Pantau secara berkala realisasi anggaran dan bandingkan dengan anggaran yang direncanakan	Sosialisasi, Surat Edaran dan Laporan	Diskominfo, BPKPAD	Diskominfo	2024	2024

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda
Tahun Penilaian

Pemerintah
Kabupaten Natuna
2024

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	C	D	E	f	g
1	Melakukan evaluasi menyeluruh, peningkatan SDM TIK, serta implementasi manajemen layanan SPBE yang lebih terstruktur dan terukur.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan Government	2024	2024	
2	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang penyusunan standar pelayanan publik	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Sekretariat	2024	2024	
3	Meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintahan, media, dan masyarakat dan Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengendalian informasi.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2024	2024	
4	Menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data antar instansi	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan Government	2024	2024	
5	Menggunakan firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi sistem dan jaringan	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan Government	2024	2024	
6	Melakukan evaluasi beban pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan penyesuaian anggaran	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2024	2024	
7	Memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan telah diverifikasi oleh sumber yang terpercaya.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2024	2024	

8	Analisis Penyebab dan Identifikasi sumber dan jenis informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2024	2024	
9	Memperkuat sistem keamanan domain dan subdomain yang digunakan pemerintah daerah seperti penggunaan password yang terus berubah, software yang ter-update, dan penggunaan firewall yang efektif.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
10	Menggunakan sertifikat SSL/TLS yang valid untuk mengamankan komunikasi di domain dan sub domain.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
11	Mengamankan infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak dari ancaman fisik serta membuat kebijakan, prosedur, dan standar yang jelas untuk penggunaan dan pengelolaan data dan informasi.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
12	Menggunakan firewall, antivirus, dan perangkat lunak keamanan lainnya, menerapkan enkripsi data, membuat sistem cadangan (backup) dan pemulihan data dan melakukan pembaruan sistem secara berkala.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
13	Pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan SPBE dapat membantu SDM untuk memahami dan mengimplementasikan SPBE secara efektif.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
14	Memperbaiki keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE, termasuk pemahaman tentang SPBE, perencanaan anggaran, dan pengelolaan risiko	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
15	Peningkatan keterampilan staf yang ada, perekrutan tenaga ahli baru, outsourcing tugas-tugas tertentu, dan penggunaan teknologi yang dapat mempermudah tugas-tugas jaringan.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
16	Pemeliharaan rutin perangkat keras, seperti membersihkan debu, memeriksa suhu, dan mengganti komponen yang sudah usang, perbarui perangkat lunak secara rutin, gunakan antivirus, dan hindari perangkat lunak yang tidak aman, pemeliharaan rutin	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	

	pada jaringan, periksa koneksi, dan gunakan perangkat jaringan yang berkualitas						
17	Pengiriman formulir pembaruan data atau penyarangan data ganda dan penerapan validasi data saat input, seperti pengecekan format atau rentang nilai yang valid serta Integrasi sistem database yang berbeda untuk memastikan data yang konsisten	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024		
18	identifikasi sumber masalah, penerapan prosedur kualitas data, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024		
19	Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga ahli statistik, Rekrutmen tenaga ahli statistik yang kompeten, Penggunaan tenaga ahli statistik yang berasal dari lembaga lain (misalnya BPS), Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data statistik dan Penggunaan teknologi informasi yang tepat guna.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024		
20	Tentukan data statistik mana yang tidak sesuai standar, tinjau standar yang berlaku dan bandingkan dengan data yang ada dan Implementasikan mekanisme kontrol, seperti validasi data atau audit, untuk mencegah masalah serupa di masa depan.	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024		
21	Melakukan pembersihan, validasi, dan verifikasi data secara rutin, Memastikan keakuratan, validitas, dan konsistensi hasil analisis dan Menyampaikan hasil analisis secara jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024		
22	melakukan evaluasi dan identifikasi sumber-sumber ketidakakuratan data. Kemudian, tindakan perbaikan perlu dirancang dan dilaksanakan, seperti peningkatan kualitas data, peningkatan validasi data, dan penerapan sistem pengendalian internal yang lebih kuat	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024		
23	Penggunaan dan Keamanan Komunikasi Sandi, Penyimpanan dan Pengamanan Informasi Sandi, Melakukan pemantauan secara berkala dan Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024		

	pegawai tentang prosedur pengendalian komunikasi sandi					
24	Melakukan audit keamanan informasi secara berkala, Peningkatan kesadaran keamanan informasi, Penggunaan teknologi sandi yang aman dan Perbaikan infrastruktur keamanan fisik	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
25	Membuat kebijakan yang jelas dan terukur, Menetapkan prosedur baku, Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pengendalian dan Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
26	Menerapkan sistem backup dan pemulihan yang efektif, Melakukan pemeliharaan sistem secara rutin, Menerapkan sistem autentikasi yang kuat dan Mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Bidang Penyelenggaraan E-Government	2024	2024	
27	identifikasi penyebab keterlambatan, penentuan target penyusunan, dan implementasi langkah-langkah korektif seperti pelatihan, penggunaan teknologi, dan perubahan prosedur	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Sekretariat	2024	2024	
28	Identifikasi Penyebab Ketidakakuratan, Implementasikan sistem pengumpulan data yang lebih baik dan Pantau secara berkala realisasi anggaran dan bandingkan dengan anggaran yang direncanakan	Monitoring dan Konfirmasi	Diskominfo dan Sekretariat	2024	2024	

